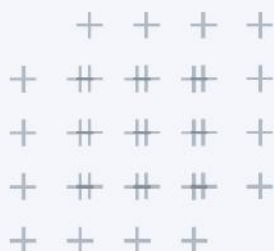


RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR

2023



RENCANA KERJA / RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2023



inspektorat@blitarkota.go.id



[inspektorat kota blitar](https://www.youtube.com/inspektorat_kota_blitar)



[inspektoratkotablitar](https://www.facebook.com/inspektoratkotablitar)



[@inspektoratkotablitar](https://www.instagram.com/inspektoratkotablitar)

KOTA BLITAR



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.



**INSPEKTUR DAERAH
KOTA BLITAR**
SUYOTO, SPd. M.Pd.
Pembina UtamaMuda
NIP. 196310141984031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
 BAB I PENDAHULUAN	 8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Landasan Hukum	11
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	15
 BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU	 18
2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar	18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar	54
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar	57
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	60
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	80
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 82
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	82
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar	96

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, LOKASI, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KERJA PERANGKAT DAERAH	98
 BAB V PENUTUP	 112
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	112
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	113
5.3 Rencana Tindak Lanjut	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Tahun 2021	18
Tabel 2.2	Alokasi dan Serapan Anggaran Program Tahun 2021	19
Tabel 2.3	Rincian Serapan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021	19
Tabel 2.4	Capaian Kinerja dan Anggaran per Sasaran	22
Tabel 2.5	Capaian Kinerja dan Anggaran per Program	23
Tabel 2.6	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022	24
Tabel 2.7	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Blitar – Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021	36
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota BLitar	55
Tabel 2.10	Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	59
Tabel 2.11	Usulan Program/Kegiatan dari Masyarakat Kota Blitar	79
Tabel 3.1	Tujuan dan Formulasi Perhitungan (Renstra Tahun 2021-2026)	95
Tabel 3.2	Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan (Renstra 2021-2026)	96
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah	98
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Blitar	99

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Imam Bonjol Nomor 09 Blitar



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar.

Rencana Kerja (Renja) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Blitar. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu yang di *breakdown* dari Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses pemikiran untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat

Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Kerja (Renja) juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk risiko-risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah karena perencanaan jangka menengah 5 tahunan berisiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif.

Dalam menyusun perencanaan mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan untuk penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan. Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk memberikan tanggapan dan respon implementasi melalui dinas-dinas terkait yang diformulasikan dalam bentuk berbagai kegiatan selama rentang waktu satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Oleh karena itu RPJMD Kota Blitar Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan Daerah dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. RKPD Kota Blitar Tahun 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen yang terintegrasi, karena RKPD menjadi pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Mengingat sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, maka RKPD Kota Blitar Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan rencana penganggaran yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Tabel 1.1
Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar
Dengan RPJMD Pemerintah Kota Blitar

RPJMD			RENSTRA		
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis
MISI KE 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan sistem daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan sistem daerah	Opini BPK atas LKPD	Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; c. penyusunan agenda kerja tim

penyusun Renja Perangkat Daerah; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) dipergunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya, dan dipergunakan juga sebagai *“Service Agreement”* atau Komitmen Kinerja serta *“Performance Agreement”* atau Pengukuran Kinerja. Serta sebagai dasar untuk pemantauan Program/Kegiatan dan tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Blitar pada akhir tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ/ Tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7)
27. Peraturan Daerah Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22).
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor XX tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX).
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah sebagai media yang mengakomodir program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan, menjadi dasar untuk pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran dan untuk menentukan indikatif besaran anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2023 yang menjadi penjabaran RPJMD Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai penyusunan KUA-PPAS Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar
- 1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar
- 1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Evaluasi kinerja tahun 2021 didasarkan pada rencana kerja tahun 2021 yang tertuang dalam LKj Inspektorat Tahun 2021.

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021, Realisasi atas anggaran tahun 2021 sebesar Rp 9.995.076.907,94 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.337.975.885,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 5.657.101.022,94 sehingga capaian serapan anggaran atas pencapaian sasaran strategis sebesar 95,90%.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%CAPAIAN
Belanja Tidak Langsung	4.589.997.050,00	4.337.975.885,00	94,51%
Belanja Langsung	5.832.743.329,00	5.657.101.022,94	96,99%
TOTAL	10.422.740.379,00	9.995.076.907,94	95,90%

Tabel 2.2
Alokasi dan Serapan Anggaran Program Tahun 2021

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.095.761.800,00	2.952.452.058,00	95,37
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	516.948.950,00	503.988.838,00	97,49
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.810.029.629,00	6.538.636.011,94	96,01
JUMLAH TOTAL	10.422.740.379,00	9.995.076.907,94	95,90

Tabel 2.3
Rincian Serapan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	% Anggaran	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	6.810.029.629,00	65,34%	6.538.636.011,94	96,01%
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.862.900,00	0,70%	72.309.600,00	99,24%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.909.600,00	0,09%	8.909.000,00	99,99%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.953.300,00	0,61%	63.400.600,00	99,14%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.589.997.050,00	44,04%	4.337.975.885,00	94,51%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.589.997.050,00	44,04%	4.337.975.885,00	94,51%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	357.891.550,00	3,43%	356.645.300,00	99,65%
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.078.700,00	0,37%	39.078.700,00	100,00%
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.991.600,00	0,05%	4.991.600,00	100,00%
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	313.821.250,00	3,01%	312.575.000,00	99,60%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	870.852.650,00	8,36%	859.614.960,00	98,71%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	% Anggaran	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.386.200,00	0,05%	5.386.200,001	100,00%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	438.126.000,00	4,20%	432.962.000,00	98,82%
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1	15.549.600,00	0,15%	15.546.700,00	99,98%
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.463.500,00	1,75%	179.512.300,00	98,38%
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.964.800,00	0,26%	26.950.000,00	99,95%
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.780.000,00	0,07%	6.780.000,001	100,00%1
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.582.550,00	1,88%	192.477.760,00	98,41%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000,002	2,54%	265.000.000,001	100,00%
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.000.000	2,54%	265.000.000,00	100,00%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.477.479,00	0,79%	81.462.951,00	98,77%
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.477.479,00	0,79%	81.462.951,00%	98,77%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.948.000,00	5,48%	565.627.315,94	99,07%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.703.600,00	0,74%	73.152.105,00	95,37%
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	421.732.500,00	4,05%	420.059.910,94	99,60%
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.511.900,00	0,70%	72.415.300,00	99,87%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.095.761.800,00	29,70%	2.952.452.058,00	95,37%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	% Anggaran	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.049.751.300,00	29,26%	2.914.853.358,00	95,58%
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerinta Daerah	140.175.800,00	1,34%	136.467.200,00	97,35%
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	51.411.200,00	0,49%	48.547.200,00	94,43%
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	707.630.100,00	6,79%	638.434.460,00	90,22%
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	81.335.700,00	0,78%	80.952.000,00	99,53%
2.1.5	Kerjasama Pengawasan Internal	1.935.790.000,00	18,57%	1.903.052.698,00	96,31%
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	133.408.500,00	1,28%	107.399.800,00	80,50%
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	46.010.500,00	0,44%	37.598.700,00	81,72%
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16.831.900,00	0,16%	16.831.900,00	100,00%2
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	29.178.600,00	0,28%	20.766.800,00	71,17%
3	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	516.948.950,00	4,96%	503.988.838,00	97,49%
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	103.123.100,00	0,99%	99.107.000,00	96,11%
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	103.123.100,00	0,99%	99.107.000,00	96,11%
3.2	Asistensi dan Pendampingan	413.825.850,00	3,97%	404.881.838,00	97,84%
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	10.700.200,00	0,10%	10.475.200,00	97,90%
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	96.660.400,00	0,93%	91.277.800,00	94,43%
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	61.564.300,00	0,59%	61.564.300,00	100,00%
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	244.900.950,00	2,35%	241.564.538,00	98,64%
JUMLAH		10.422.740.379,00	100%	9.995.076.907,94	95,90%

Tabel 2.4
Capaian Kinerja dan Anggaran per Sasaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A	BB (72,06)	90,07%	10.422.740.379,00	9.995.076.907,94	95,90%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%			
Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	80%	92,21%	115,26%			

Tabel 2.5
Capaian Kinerja dan Anggaran per Program

PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	70%	98%	139,94%	3.095.761.800,00	2.952.452.058,00	95,37%
	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	70%	81%	115,21%			
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	85%	95 %	111,88%			
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	85%	95 %	111,88%			
	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP level terdefinisi (3)	80%	100 %	125,00%			
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	516.948.950,00	503.988.838,00	97,49%
	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%			
	Persentase OPD yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 OPD	0 OPD	0%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	6.810.029.629,00	6.538.636.011,94	96,01%
	Nilai SAKIP OPD	81,50	84,95	104%			

Tabel 2.6

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2022 (Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021)

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
Bidang Urusan : INSPEKTORAT										
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	72,5	%		70	97,96	139,94%	72,5	72,5	100%
	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	72,5	%		70	80,69	115,27%	72,5	72,5	100%
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	86	%		85	95,1	111,88%	86	86	100%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	86	%		85	95,1	111,88%	86	86	100%
	Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)	80	%		80	100	125,00%	80	80	100%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90	%		90	94,63%	105,14%	90	90	100%
	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87,5	%		87,5	80,50%	92%	87,5	87,5	100%
	Persentase laporan keuangan OPD yang telah direviu	70	%		70	100%	142,85%	70	70	100%
	Jumlah OPD yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10	%		15	27,50%	183,33%	10	10	100%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	30	Laporan		1	2	200%	30	30	100%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	40	Laporan		20	70	350%	40	40	100%
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	3	Laporan		66	74	112,12%	3	3	100%
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan	50	Laporan		65	73	112,30%	50	50	100%
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan Saber Pungli	2	Laporan		2	7	350%	2	2	100%
	Jumlah tim APH yang difasilitasi	2	Tim		2	2	100%	3	3	150%
	Jumlah tim pengawas eksternal dan APIP lainnya yang difasilitasi	3	Tim		4	4	100%	3	3	100%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan	2	Dokumen		2	2	1100%	2	2	100%
	Jumlah rekomendasi APIP dan internal lainnya yang ditindaklanjuti	30	Rekomendasi		15	15	100%	30	30	100%
	Jumlah rekomendasi BPK dan eksternal lainnya yang ditindaklanjuti	20	Rekomendasi		30	40	133,33%	20	20	100%
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	100	%		100	100	100%	100	100	100%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	2	Laporan		2	2	100%	2	2	100%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDDT	2	Dokumen		4	4	100%	2	2	100%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%		100	100	100%	100	100	100%
	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29	Jumlah		29	29	100%	29	29	100%
	Persentase OPD yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1	OPD		1	3	300%	1	1	100%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4	Dokumen		4	4	100%	4	4	100%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	4	Dokumen		4	4	100%	4	4	100%
Asistensi dan Pendampingan	Persentase kasus/pengaduan	100	%		100	100	100%	100	100	100%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
	masyarakat yang dapat diselesaikan									
	Persentase OPD yang dievaluasi SAKIP	100	%		100	100	100%	100	100	100%
	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	4	OPD		4	4	100%	4	4	100%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi	2	Laporan		2	2	100%	2	2	100%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan PMPRB	1	Laporan		1	2	200%	1	1	100%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil evaluasi MCP KPK	2	Laporan		-	-	-	2	2	100%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
	Jumlah laporan hasil monitoring RAD PPK	2	Laporan		-	-	-	2	2	100%
	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	5	Kasus		-	-	-	8	8	160%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	4	OPD		-	-	-	5	5	125%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	B (83,5)	%		-	-	-	83,5	83,5	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100	100%		-	-	-	100	100	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	26	Dokumen		10	10	100%	26	26	100%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	35	Dokumen		35	7	20%	35	35	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kecukupan pelayanan keuangan kantor	100	%		100	300	300%	100	100	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	37	ASN		-	-	-	38	38	102,70%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan pelayanan kepegawaian	100	%		100	100	100%	100	100	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5	Event		1	1	100%	2	2	40%
	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	1	Jenis		-	-	-	1	1	100%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase peserta bimbingan teknis/pelatihan/diklat teknis yang ikut dan lulus dengan baik	100	%		100	100	100%	100	100	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	2	Jenis		2	2	100%	2	2	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%		100	100	100%	100	100	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6	Jenis		6	6	100%	6	6	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	21	Macam		21	21	100%	2	2	9%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	24	Macam		24	24	100%	24	24	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1	Paket		1	1	100%	1	1	100%
	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	14	Jenis		14	14	100%	14	14	100%
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	60	Macam		60	60	100%	60	60	100%
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia	7	Cetakan		8	8	100%	5	5	71,40%
	Jumlah lembar penggandaan	20.000	Lembar		10.799	10.799	100%	2.500	2.500	12,50%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	2	Bahan bacaan		2	2	100%	2	2	100%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	320	Rapat		320	320	100%	200	200	62,50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100	%		100	100	100%	100	100	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	0	Unit		1	1	100%	0	0	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang kantor	100	%		100	100	100%	100	100	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan tepat waktu	4	Rekening		4	4	100%	4	4	100%
Pemeliharaan Barang Miki Daerah Penunjang	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%		100	100	100%	100	100	100%

RENCANA KERJA 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7 =(6/5)	8	9=4+6+8	10=(9/3)
Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	7	Unit		6	6	100%	7	7	100%
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	17	Unit		15	15	100%	18	18	1,05%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1	Unit		2	2	100%	2	2	200%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	20	Jenis		20	20	100%	15	15	Cf 75%

Tabel 2.7
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA BLITAR - INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	INSPEKTORAT			10.422.740.379,00		9.995.076.907,94		96,90%
1	PROGAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	70%	3.095.781.800,00	98%	2.952.452.058,00	139,94%	95,37%
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	70%		81%		115,27%	
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	85%		95%		111,88%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	85%		95%		111,88%	
		Pesentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)	80%		100%		125,00%	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90%	3.049.751.300,00	95%	2.914.853.358,00	105,14%	95,58%
		Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	88%		81%		92,00%	
		Persentase Laporan Keuangan OPD yang telah direviu	70%		100%		142,88%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah OPD yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	15%		28%		183,33%	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	1 Laporan	140.175.800,00	2 Laporan	136.467.200,00	200%	97,35%
		Jumlah OPD yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 OPD		8 OPD		80%	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	20 laporan	51.411.200,00	70 laporan	48.547.200,00	350%	94,43%
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	66 laporan	707.630.100,00	74 laporan	638.434.460,00	112,12%	90,22%
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan	65 laporan	81.335.700,00	73 laporan	80.952.000,00	112,31%	99,53%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Saber Pungli	2 laporan	1.935.790.000,00	7 laporan	1.903.052.698,00	350%	98%
		Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani	2 kasus		3 kasus		150%	
		Jumlah Tim APH yang difasilitasi	2 tim		2 tim		100%	
		Jumlah Tim Pengawas Eksternal dan APIP lainnya yang difasilitasi	4 tim		4 tim		100%	
	Monitoing dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan	2 dokumen	133.408.500,00	2 dokumen	107.300.800,00	100%	80,50%
		Jumlah rekomendasi APIP dan internal lainnya yang ditindaklanjuti	15 rekomendasi		15 rekomendasi		100%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah rekomendasi BPK dan eksternal lainnya yang ditindaklanjuti	30 rekomendasi		40 rekomendasi		133,33%	
	Penyelenggaraan dengan Pengawasan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	100%	46.010.500,00	100%	37.598.700,00	100%	81,72%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penganganan penyelesaian kerugian negara/daerah	2 laporan	16.831.900,00	2 laporan	16.831.900,00	100%	100%
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hadil PDTT	4 dokumen	29.178.600,00	4 dokumen	20.766.800,00	100%	71,17%
2	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	516.948.950,00	100%	503.988.838,00	100%	97,49%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah OPD dengan nilai SAKIP minimal Memuaskan (A)	29		100%		100%	
		Persentase OPD yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 OPD		0 OPD		0%	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4 doku men	103.123.100,00	4 doku men	99.107.000,00	100%	96,11%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	4 doku men	103.123.100,00	4 doku men	99.107.000,00	100%	96,11%
		Jumlah peserta rapat koordinasi pengawasan	60 orang		60 orang		100%	
	Asistensi dan Pendampingan	Persentase kasus/pengaduan	100%	413.825.850,00	100%	404.881.838,00	100%	97,84%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
		masyarakat yang dpat diselesaikan						
		Persentase OPD yang dievaluasi SAKIP	100%		100%		100%	
		Jumlah perangkat daeah Zona Integitas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	4 OPD		100%		100%	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi	2 lapora n	10.700.200,00	2 lapora n	10.475.200,00	100%	97,90%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan PMPRB	1 lapora n	96.669.400,00	1 lapora n	91.277.800,00	100%	94,43%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pencegahan	4 lapora n	61.564.300,00	4 lapora n	61.564.300,00	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Pemberantasan Korupsi	dan pemberantasan korupsi						
	Pendampingan, Asistensi dan Veifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD ZI yang dilakukan penilaian internal	4 OPD	244.900.950,00	5 OPD	241.564.538,00	125%	98,64%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEAH	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	6.810.029.629,00	100%	6.538.636.011,94	100%	96,01%
		Nilai SAKIP OPD	81,50		84,95		104%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	12 doku men	72.862.900,00	12 doku men	72.309.600,00	100%	99,24%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	10 doku men	8.909.600,00	10 doku men	8.909.000,00	100%	99,99%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
		perangkat daerah yang disusun						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	7 dokumen	65.953.300,00	7 dokumen	63.499.600,00	100%	99,14%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keukupan pelayanan keuangan kantor	100%	4.589.997.050,00	100%	4.337.975.885,00	100%	94,51%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibarkan	1 OPD	4.589.997.050,00	1 OPD	4.337.975.885,00	100%	94,51%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan pelayanan kepegawaian	100%	357.891.550,00	100%	356.645.300,00	100%	99,65%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah event daeah dan hari besa nasional yang diikuti	1 event	4.991.600,00	1 event	4.991.600,00	100%	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase peserta Bimbingan Teknis/Pelatihan/Diklat Teknis yang ikut dan lulus dengan baik	100%	313.821.250,00	100%	312.575.000,00	100%	99,60%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	2 jenis	39.078.700,00	2 jenis	39.078.700,00	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan pelayanan umum kantor	100%	870.852.650,00	100%	859.614.960,00	100%	98,71%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis	5.386.200,00	6 jenis	5.386.200,00	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	21 macam	438.126.000,00	21 macam	432.962.000,00	100%	98,82%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	24 macam	15.549.600,00	24 macam	15.546.700,00	100%	99,98%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 paket	182.463.500,00	1 paket	179.512.300,00	100%	98,38%
		Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	14 jenis		14 jenis		100%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	60 maca m		60 maca m		100%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 cetak an	26.964.800,00	8 cetak an	26.950.000,00	100%	99,95%
		Jumlah lembar penggandaan	10.79 9 lembe r		10.79 9 lembe r		100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	6.780.000,00	2 bahan bacaan	6.780.000,00	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	320 rapat	195.582.550,00	320 rapat	192.477.760,00	100%	98,41%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Pogram (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan barang penunjang kantor	100%	265.000.000,00	100%	265.000.000,00	100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	1 unit	265.000.000,00	1 unit	265.000.000,00	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase kecukupan jasa penunjang kantor	100%	82.477.479,00	100%	81.462.951,00	100%	98,77%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan tepat waktu	4 rekening	82.477.479,00	4 rekening	81.462.951,00	100%	98,77%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan pemeliharaan barang milik daerah	100%	570.948.000,00	100%	565.627.315,94	100%	99,07%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	6 unit	76.703.600,00	6 unit	73.152.105,00	100%	95,73%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	15 unit		15 unit		100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 unit	421.732.500,00	2 unit	420.059.910,94	100%	99,60%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	20 jenis	72.511.900,00	20 jenis	72.415.300,00	100%	99,87%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 , diperoleh capaian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Rata-rata capaian indikator pada Program tersebut sebesar 91,44% (dengan predikat kinerja sangat tinggi)

Meskipun rata-rata capaian kinerja pada tiap indicator kinerja program telah melampaui target, namun terdapat capaian kinerja yang masih belum memenuhi target yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Audit APIP sebesar 80,05%.

- b. Realisasi Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Kerjasama Pengawasan Internal

- c. Realisasi Kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
2. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
3. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- d. Realisasi Kegiatan yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti)

- e. Faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya Program /Kegiatan

1. Belum optimalnya pelaksanaan desk/pemutakhiran data tindak lanjut APIP.
2. Aplikasi pemutakhiran data TLHP Internal masih dalam proses penyempurnaan agar dimungkinkan OPD dapat mengakses dan menindaklanjuti secara online.
3. Adanya rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dan belum ada mekanisme /SOP yang mengatur.

- f. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah
Dari beberapa indikator kegiatan yang belum tercapai khususnya pada pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi APIP berdampak pada pencapaian kinerja Program yaitu Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti belum tercapai (80,05%).
 - g. Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil yaitu melakukan perbaikan perencanaan dan mengevaluasi kembali target-target kinerja dengan mempertimbangkan kondisi saat ini.
 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Capaian Kinerja Program sebesar 100% (telah sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan)
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Capaian Kinerja Program sebesar 100% (telah sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan)
 - b. Realisasi Kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Realisasi Kegiatan yang belum target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pada tabel di bawah ini disajikan target capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal ini, IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja level impact yang dipilih dari indikator sasaran atau indikator tujuan perangkat daerah atau indikator sasaran RPJMD sebagai wujud keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah. Basis perumusan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dengan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah tersebut dan secara langsung mendukung capaian IKU daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun target IKU dan IKK Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti			80%	81%	82%	83%	92,21%	81%	82%	83%	
2	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A	A(84,96)	A(84,97)	A(84,98)	A(84,95)	A(84,96)	A(84,97)	A(84,98)	
1			Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2			Peningkatan	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	

RENCANA KERJA 2023

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
			Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)									

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar

Pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021 adalah sebanyak 2 sasaran strategis dengan 8 Indikator sasaran, dan capaian yang dihasilkan berdasarkan Kategori Pencapaian Sasaran termasuk dalam kategori sangat berhasil sehingga secara keseluruhan sasaran strategik Inspektorat dalam tahun 2021 berdasarkan indikator sasaran telah tercapai sebesar 96,36 % atau berhasil/memuaskan. Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan intern pemerintah, Inspektorat menemui kendala dan hambatan baik pada tingkat kebijakan dan teknis. Beberapa hambatan adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah OPD yang diawasi.
2. Adanya temuan pemeriksaan pada objek pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal maupun internal masih lamban.
3. Belum ada OPD yang ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi (WBK)
4. Kapabilitas APIP belum tercapai secara memadai
5. Kurang memadainya kualitas implementasi SAKIP

Pendekatan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang terjadi di tahun sebelumnya. Beberapa isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya adalah :

1. Pemenuhan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. Pengembangan sistem, prosedur dan kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan.
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar tahun 2021 = BB).
5. Pembangunan system informasi pengawasan yang terintegrasi

6. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Selain hal tersebut, berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan OPD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Blitar berkenaan dengan urusan mengenai :

1. Inspektorat Daerah Kota Blitar telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada OPD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala OPD, namun persentase atas rekomendasi tindak lanjut ditingkat internal masih belum maksimal karena kurangnya komitmen OPD dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :
 - a Kualitas dan kompetensi Aparat Pengawasan dan tenaga operasional yang ada masih memerlukan pembinaan secara komprehensif agar dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi guna terwujudnya misi organisasi.
 - b Perlunya integrasi antar aplikasi perencanaan dan keuangan dari level OPD sampai dengan level Kota
3. Tantangan dan peluang dalam meingkatkan pelayanan
 - a. Tantangan

Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Blitar khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;
 - b. Peluang

Yang dimaksud dengan peluang dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar. Dengan demikian peluang Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.

Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, clean government dan bebas dari KKN dan Pungutan Liar.

- 2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Walaupun saat ini Inspektorat Daerah Kota Blitar telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar.

4. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN dan pungutan liar.
5. Pengukuran kinerja secara periodik, sistem pengukuran kinerja belum optimal, sistem whistle blowing dan penanganan kepentingan
6. Belum adanya OPD yang ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi.
7. Pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi.
8. Mengoptimalkan semua fungsi media dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dalam meningkatkan partisipasi pengawasan baik oleh APIP dan masyarakat dalam proses pengelolaan penganggaran dan pelayanan publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil musrenbang Inspektorat yang disusun pada awal tahun berjalan 2022. Terjadi beberapa perbedaan indikator dari level sasaran, program dan kegiatan. Hal ini dikarenakan pada saat awal penyusunan musrenbang, seiring dengan proses penyusunan renstra yang masih dalam bentuk draft. Untuk besar anggaran juga terjadi perubahan dari rancangan awal RKPD dengan rencana kerja dikarenakan pada saat penyusunan musrenbang tidak ada batas pagu anggaran, sedangkan pada saat penyusunan rencana kerja sudah ditetapkan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dari pemerintah Kota Blitar. Analisa terhadap rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.11
Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Blitar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	83.5 INDEKS	8.018.951.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	83.5 INDEKS	7,540,700,349	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	79.070.186	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	79,070,186	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	9.990.310	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	9,990,310	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	69.079.876	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	69,079,876	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	6.319.599.006	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	5,841,347,755	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	6.298.210.398	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5,819,959,147	
1.2.2	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen	9.634.350	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen	9,634,350	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	11.754.258	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	11,754,258	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	395.245.328	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	395,245,328	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	52.875.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	52,875,000	
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	112.310.328	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	112,310,328	
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	230.060.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	230,060,000	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	299.286.464	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	299,286,464	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.164.579	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,164,579	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.010.021	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30,010,021	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	16.318.594	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	16,318,594	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	25.241.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	25,241,000	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sananwet an					Sananweta n				
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.719.270	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,719,270	
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5,400,000	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	201.433.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	201,433,000	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	283.097.156	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	283,097,156	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	77.104.584	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	77,104,584	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	205.992.572	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	205,992,572	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	393.778.260	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	393,778,260	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	88.863.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	88,863,000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	304.915.260	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	304,915,260	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	248.875.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	248,875,200	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	56.169.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	56,169,100	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit	113.280.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit	113,280,000	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	104 Unit	79.426.100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	104 Unit	79,426,100	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	90 %	2.951.768.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	90 %	2,094,184,606	
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	87 %				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	87 %		

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	87 %				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	87 %		
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	75 %				Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	75 %		
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	75 %				Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	75 %		
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 PD	2.889.555.690	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 PD	2,031,971,896	
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat	79 %				Persentase Laporan Keuangan Perangkat	79 %		

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah yang telah direviu					Daerah yang telah direviu			
			Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87.5 %				Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87.5 %		
			Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90 %				Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90 %		
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan	155.348.100	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan	108,273,771	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	84.716.463	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	84,716,463	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	670.892.900	Reviu Laporan Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11 Laporan	227,184,450	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	34 laporan	134.488.503	Reviu Laporan Keuangan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan	134,488,503	
2.1.5	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	1.662.564.324	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	1,397,749,551	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	181.545.400	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	52 Dokumen	79,559,158	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100 %	62.212.710	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100 %	62,212,710	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	30.255.666	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	30,255,666	
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	31.957.044	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	31,957,044	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29 OPD	920.373.200	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29 OPD	595,444,620	
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 OPD				Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 OPD		
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4 DOKUMEN	73.153.239	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4 DOKUMEN	73,153,239	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	15.263.016	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	15,263,016	
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	57.890.223	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	57,890,223	
3.2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	4 PD	847.219.961	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	4 PD	522,291,381	
			Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %				Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %		

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100 %				Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100 %		
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	29 perangkat daerah	69.101.225	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	29 perangkat daerah	69,101,225	
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	105.100.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	77,045,208	

RENCANA KERJA 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan	88.029.867	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan	71,914,948	
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 perangkat daerah	584.988.869	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 perangkat daerah	304,230,000	
JUMLAH					11.891.093.200	JUMLAH				10,230,329,575	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Blitar tidak didapati program/kegiatan yang mengarah kepada program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar. Adapun hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat pada program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 adalah nihil.

Tabel 2.12
Usulan Progam / Kegiatan Dari Masyarakat Kota Blitar

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	PAGU
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselenggarakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.

- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber dayamasyarakat (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber dayapertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;

- 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
- f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi

pariwisata prioritas dan destinasi *branding*, dan produk kreatif; dan

- 7) peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.

h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
- 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan *industry 4.0*;
- 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
- 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
- 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta

e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui

pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.

- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama

industri;

- 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
- 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
- 4) prestasi olahraga.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;

- 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatanberlandaskan Pancasila; dan
 - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

 - a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, amandan terjangkau;

- 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
 - c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) bangun industri hijau
7. memperkuat stabilitas politi, hukum dan keamanan dan transformasi pelayanan public

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelolakeamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dan Inspektorat Kota Blitar; dan
- c. Meningkatkan penjaminan mutu (*quality insurance*) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar Tahun 2023 untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2023 berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah .

Sehubungan dengan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Blitar tidak terdapat program dan kegiatan yang berkaitan atau ditiptikan pada program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar karena program dan kegiatan

Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian keberhasilan misi. Dengan merumuskan tujuan dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus. Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Blitar di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Formulasi Perhitungan (Renstra Tahun 2021 – 2026)

Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target Tahun 2023
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB	72,20 (BB)
Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem daerah	Opini BPK Atas LKPD	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan	WTP

		Keuangan Pemerintah Kota Blitar	
--	--	------------------------------------	--

Tabel 3.2

Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan (Renstra 2021-2026)

Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target Tahun 2023
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP Inspektorat Hasil Evaluasi SAKIP Inpektorat	A
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP A dibagi Jumlah OPD yang dievaluasi x 100%	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Jumlsh rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang ada x 100%	82%



BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, LOKASI, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Blitar mendukung Prioritas Pembangunan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berorientasi masyarakat, dan berbasis teknologi informasi. Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas PD	Program	Kegiatan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berorientasi Masyarakat, dan berbasis Teknologi Informasi	Blitar Melayani	Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas pengawasan Pemerintah Daerah	Program penyelenggaraan pengawasan, Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Asistensi dan Pendampingan

Sumber : Inspektorat Kota Blitar Tahun 2021

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kedaluwarsa;
2. Memaksimalkan Aplikasi SIPTLHP dan SIPTL untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK;
3. Sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline;
4. Pembentukan agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas;
5. Mengembangkan Inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata khususnya kepada masyarakat luas;
6. Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan;
7. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas;
8. Mengoptimalkan peran pembinaan dan konsultasi;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya APIP melalui Pendidikan dan Bimbingan Teknis.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Inpektorat Kota Blitar tahun 2023 adalah 3 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Blitar

RENCANA KERJA 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	1				INSPEKTORAT DAERAH						10,230,329,575							10,688,842,151	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS		INDEKS	84 IN DEKS	7,540,700,349						84 IN DEKS	7,864,731,464	
6	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%		%	100 %	79,070,186						100 %	83,023,695	
6	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				26 Dok umen	9,990,310	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Daerah Kota Blitar	26 Dok umen	10,489,826	Inspektorat
6	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Lapo ran	69,079,876	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Daerah Kota Blitar	7 Lapo ran	72,533,870	Inspektorat

RENCANA KERJA 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1						2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	%		%	100 %	5,841,347,755							100 %	6,080,411,240	
6	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Ora ng/bul an	5,819,959,147	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	37 Ora ng/bul an	6,057,953,202	Inspektorat	
6	1	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				250 Do kumen	9,634,350	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	250 Do kumen	10,116,068	Inspektorat	
6	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Lap oran	11,754,258	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	18 Lap oran	12,341,971	Inspektorat	
6	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%		%	100 %	395,245,328						100 %	415,007,594		

RENCANA KERJA 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1						2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Pake t	52,875,000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	2 Pake t	55,518,750	Inspektorat	
6	1	1	2.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				40 Ora ng	112,310,328	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	40 Ora ng	117,925,844	Inspektorat	
6	1	1	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				37 Ora ng	230,060,000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	37 Ora ng	241,563,000	Inspektorat	
6	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		%	100 %	299,286,464						100 %	314,250,787		
6	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Pake t	4,164,579	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	1 Pake t	4,372,808	Inspektorat	

RENCANA KERJA 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1						2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Pake t	30,010,021	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	3 Pake t	31,510,522	Inspektorat
6	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					4 Pake t	16,318,594	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	3 Pake t	17,134,524	Inspektorat
6	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					20 Pak et	25,241,000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	20 Pak et	26,503,050	Inspektorat
6	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Pake t	16,719,270	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	1 Pake t	17,555,234	Inspektorat
6	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					24 Dok umen	5,400,000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	24 Dok umen	5,670,000	Inspektorat

RENCANA KERJA 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Lapo ran	201,433,000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	6 Lapo ran	211,504,650	Inspektorat
6	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	%		%	100 %	283,097,156						100 %	297,252,014	
6	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	77,104,584	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at	5 Unit	80,959,813	Inspektorat
6	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Uni t	205,992,572	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at	21 Uni t	216,292,201	Inspektorat
6	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%		%	100 %	393,778,260						100 %	413,467,173	
6	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Lap oran	88,863,000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at	36 Lap oran	93,306,150	Inspektorat

RENCANA KERJA 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Lap oran	304,915,260	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at	13 Lap oran	320,161,023	Inspektorat
6	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%		%	100 %	248,875,200						100 %	261,318,960	
6	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Uni t	56,169,100	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	17 Uni t	58,977,555	Inspektorat
6	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi				2 Unit	113,280,000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	2 Unit	118,944,000	Inspektorat
6	1	1	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi				104 Un it	79,426,100	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspekt or at Kota Blitar	104 Un it	83,397,405	Inspektorat
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	%		%	90 %	2,094,184,606						90 %	2,198,893,836	

RENCANA KERJA 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%		%	87 %							87 %		
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%		%	87 %							87 %		
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%		%	75 %							75 %		
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%		%	75 %							75 %		
6	1	2	2.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	PD		PD	10 PD	2,031,971,896						10 PD	2,133,570,491	
					Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	%	%		70 %	79 %									
					Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	%	%		87.5 %	87.5 %									
					Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	%	%		90 %	90 %									

RENCANA KERJA 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1						2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	2	2.0 1	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					30 Lap oran	108,273,771	Kota Blitar, Sanan wetan, Semua Kelura han	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPETOR AT DAN OPD TERKAIT	30 Lap oran	113,687,460	Inspektorat
6	1	2	2.0 1	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					40 Lap oran	84,716,463	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPETOR AT DAN OPD TERKAIT	40 Lap oran	88,952,286	Inspektorat
6	1	2	2.0 1	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja					11 Lap oran	227,184,450	Semua Kab/K ota, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPETOR AT DAN OPD TERKAIT	11 Lap oran	238,543,673	Inspektorat
6	1	2	2.0 1	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					50 Lap oran	134,488,503	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPETOR AT DAN OPD TERKAIT	50 Lap oran	141,212,928	Inspektorat
6	1	2	2.0 1	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk					3 Kese pakata n	1,397,749,551	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPETOR AT DAN OPD TERKAIT	3 Kese pakata n	1,467,637,029	Inspektorat

RENCANA KERJA 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	2	2.0 1	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				52 Dok umen	79,559,158	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPETOR AT DAN OPD TERKAIT	52 Dok umen	83,537,116	Inspektorat
6	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	%		%	100 %	62,212,710						100 %	65,323,346	
6	1	2	2.0 2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Lapo ran	30,255,666	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPEKTO RAT DAN OPD TERKAIT	2 Lapo ran	31,768,449	Inspektorat
6	1	2	2.0 2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				2 Lapo ran	31,957,044	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPEKTO RAT DAN OPD TERKAIT	2 Lapo ran	33,554,896	Inspektorat
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	OPD		OPD	29 OP D	595,444,620						29 OP D	625,216,851	
						Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	OPD		OPD	1 OPD							1 OPD		
						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%		%	100 %							100 %		

RENCANA KERJA 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	3	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	DOKU MEN		DOKUME N	4 DOK UMEN	73,153,239						4 DOK UMEN	76,810,901	
6	1	3	2.0 1	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Reko menda si	15,263,016	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPEKTO RAT DAN OPD TERKAIT	4 Reko menda si	16,026,167	Inspektorat
6	1	3	2.0 1	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				4 Reko menda si	57,890,223	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPEKTO RAT DAN OPD TERKAIT	4 Reko menda si	60,784,734	Inspektorat
6	1	3	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	PD		PD	4 PD	522,291,381						4 PD	548,405,950	
						Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%		%	100 %							100 %		
						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	%		%	100 %							100 %		
6	1	3	2.0 2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				29 per angkat daerah	69,101,225	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPEKTO RAT DAN OPD TERKAIT	29 per angkat daerah	72,556,286	Inspektorat

RENCANA KERJA 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realis asi Capaia n RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sume r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	3	2.0 2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 per angkat daerah	77,045,208	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPEKTO RAT DAN OPD TERKAIT	10 per angkat daerah	80,897,468	Inspektorat
6	1	3	2.0 2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				16 Keg iatan	71,914,948	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPEKTO RAT DAN OPD TERKAIT	16 Keg iatan	75,510,695	Inspektorat
6	1	3	2.0 2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				6 pera ngkat daerah	304,230,000	Kota Blitar, Sanan wetan, Sanan wetan	Penda patan Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	INSPEKTO RAT DAN OPD TERKAIT	6 pera ngkat daerah	319,441,500	Inspektorat



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat tahun 2023 sebagai penjabaran Renstra Inspektorat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2023. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2023. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Inspektorat Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja

Tahun 2023 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas pengawasan yang semakin kompleks, Inspektorat Daerah Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
- b. Penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan pengawasan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses pengawasan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan
- e. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para

pimpinan manajemen dan seluruh aparat Inspektorat Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Blitar, Juli 2022
INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR



SUYOTO, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196310141984031004